



Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Atep Kemal Hakiki

Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

ABSTRACT

This article is entitled "Policy Evaluation of Organizational Structure at the Regional Secretariat of Tasikmalaya Regency". This study aims to identify and analyze the evaluation of organizational structure policies at the Regional Secretariat of Tasikmalaya Regency. The indicators used to evaluate the organizational structure of the Tasikmalaya District Secretariat consist of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The informants used in this study consisted of elements of the state civil apparatus at the Regional Secretariat of Tasikmalaya Regency. The results showed that the evaluation activities carried out were able to achieve goals in organizational management, which can be seen from the arrangement that was carried out by prioritizing the effectiveness of implementing government tasks through structural positions that had been formed. However, in the aspect of efficiency in the organizational structuring policy of the regional apparatus of Tasikmalaya Regency, seen from its implementation, it has not yet reached the efficiency criteria. In terms of the adequacy of the arrangement of the Tasikmalaya Regency Regional Secretariat, it has been carried out according to the applicable mechanism, namely the existence of job analysis and workload analysis of the organizational structure of the Tasikmalaya Regency government. In terms of the leveling aspect, it is in accordance with the procedures and needs. In terms of responsiveness, the results of the study show that the policy on organizational structuring of the Regional Secretariat in Tasikmalaya Regency has been running in accordance with the technical guidelines for structuring the Regency/City Regional Secretariat, namely Permendagri No. 56 of 2019 which was subsequently passed down in the form of Tasikmalaya Regent Regulation Number 119 of 2021. And lastly, seen from aspects of accuracy, the arrangement of the Organizational Structure within the scope of the Tasikmalaya Regency Regional Secretariat has been adjusted to the affairs that have been delegated by the central government to the local government where regional regulations regarding organizational arrangements that have been compiled by the Tasikmalaya Regency government have been adjusted to higher regulations.

Keywords: Evaluation, Policy, Organizational Structure, Regional Secretariat.

ABSTRAK

Artikel ini berjudul "Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan struktur organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Kebijakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari unsur aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dalam penataan organisasi, dapat dilihat dari penataan yang di lakukan dengan mengedepankan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan melalui jabatan struktural yang sudah di bentuk. Namun dalam aspek efisiensi dalam kebijakan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Dari sisi kecukupan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di lakukan sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap struktur organisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ditinjau Dari aspek pemerataan sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dari sisi responsivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019 yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021. Dan terakhir Dilihat dari aspek ketepatan, penataan Struktur Organisasi di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah di sesuaikan dengan urusan – urusan yang sudah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Struktur Organisasi, Sekretariat Daerah.

PENDAHULUAN

Hal ini didasarkan pada pelimpahan kekuasaan dari Pusat ke Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan mengakibatkan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan daerah, termasuk hubungan antara lembaga daerah, pemerintah pusat dan provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah (pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, hubungan pemerintah kabupaten/kota) tidak bersifat hierarkis, tetapi masing-masing memiliki status sebagai daerah otonom. Hal ini berimplikasi pada distribusi dan pembagian kekuasaan antara pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota (Heryani, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kelembagaan daerah. Dasar utama pengembangan organisasi daerah sebagai organisasi adalah adanya urusan publik yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan provinsi, namun hal ini berarti bahwa semua urusan publik harus dilaksanakan dengan tidak ada salahnya. diatur dalam organisasi tersendiri. Dengan adanya perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan kelembagaan sekurang-kurangnya fungsi pemerintahan ditempatkan pada setiap tingkatan pemerintahan.

pemerintah daerah di atas usiadentralisasi Sekarang ini Sejak kebebasan yang mana lebar dari keputusan membentuk organisasi dari Manipulasi pihak berwajib yang milik pemerintah daerah mengikuti pekerjaan juru tulis yang mana sah dari nomor undangan dua puluh tiga tahun 2014 hampir pemerintah lokal. Melarikan diri pihak berwajib yang mana milik pemerintah daerah, membutuhkan unit organisasi.

pengaturan ini memerlukan proses yang panjang Dimana hal ini dibutuhkan dalam proses yang terstruktur berencana Dan penerapan yang lagiumumnya Ke Penerima tujuan. dengan menjadi Berhasil menggunakan (kedatangan hasil yang optimal) penempatan jaringan yang terkena Ke situasi lingkungan; Jika lingkungan stabil Dan itu semua pengalaman sedikit mengubah, Jadi Tidak perlu mengubah organisasi penempatan Tetapi Jika lingkungan mengubah dengan cara itu penting dan akibatnya memiliki dampak yang besar Pengaturan organisasi menjadi sangat penting ditemukan dua mendekati menilai sekali lagi pengukuran Pengaturan organisasi, Itu dia mendekati tujuan (*sasaran pendekatan*) Dan mendekati mengikuti teori sistem (*sistem hipotesa pendekatan*). mengikuti mendekati tujuan, memengaruhi organisasi (*terorganisir keefektifan*) ditafsirkan sekali lagi ditafsirkan Sebagai tingkat Pencapaian tujuan dan sasaran selama ini telah di atur. Dengan kata lain mengikuti mendekati ini atau tingkat Pencapaian tujuan itu dia menunjukkan tingkat Efektivitas organisasi.

Sebagai salah satu perangkat daerah kabupaten/kota, sekretariat daerah bertugas membantu gubernur/walikota dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Badan dan pelayanan administrasi daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kebijakan kelembagaan terkait kelembagaan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik untuk percepatan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kelembagaan daerah. Dasar utama pengembangan kelembagaan daerah sebagai organisasi adalah adanya urusan publik yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan sukarela, namun tidak berarti semua urusan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan pergantian istilah distribusi Dalam hal pemerintahan serentak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten Administrasi, sekurang-kurangnya fungsi pemerintahan tercakup dalam setiap tingkatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan kelembagaan. Pembentukan dewan distrik diatur dengan undang-undang Pasal 23 Tahun 2014 Pasal 208 menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pengawas, Badan, Lembaga dan Kecamatan. Pembentukan kelembagaan daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya secara efisien, meningkatkan pelayanannya, dan meningkatkan pelayanannya. kebahagiaan publik UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah yang berbeda memiliki prioritas yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik daerahnya. Ini adalah pendekatan asimetris, artinya meskipun daerah sama-sama berhak atas otonomi yang seluas-luasnya, prioritas pemerintah, termasuk kelembagaan, berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Daerah lain, tergantung dari karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. sebagai pedoman pembangunan organisasi perangkat daerah dengan prinsip rasional, proporsional, efektif dan efisien. 18/18/2016 tentang Perangkat Daerah.

dan terjadinya perubahan organisasi Struktur organisasi di sekretariat daerah Tasikmalaya. Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Daerah, tambahan beberapa hubungan pemerintah harus Ditarik oleh Sekretariat Daerah, termasuk operasi pengarsipan, perpustakaan komunikasi dan informasi. Pekerjaan komunikasi Dan informatika telah diselenggarakan bentuk departemen Secara struktural pada hirarki level III, menggunakan nomenklatur bagian komunikasi Dan Informatika. Sedangkan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan diselenggarakan dalam bentuk bagian yang jabatan strukturalnya setingkat eselon IV dengan nomenklatur Subbagian Kearsipan dan Perpustakaan. Subbagian ini berada di bawah koordinasi Bagian Pembantu Tata Usaha dengan status struktural Eselon IV. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabupaten Tasikmalaya belum ideal. Unit organisasi yang menangani masalah

tersebut hanya berupa divisi dan subdivisi, dan beban kerjanya ditangani di tingkat lembaga/kantor. .

Berdasarkan pemaparan di atas, Pemerintah sangat memperhatikan peraturan dan kebijakan yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah yang memperhatikan secara khusus Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021 tentang jabatan, susunan organisasi. sangat penting memperhatikan berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi satker kabupaten yang sebenarnya tidak dapat mengacu pada nomenklatur dan pedoman satker dinas provinsi dan kabupaten/kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dinas kecamatan.

Styling pada dasarnya Organisasi perangkat daerah harus menggunakan prinsip organisasi, visi dan misi yang jelas, Melembagakan staf dan fungsi lini Selain jelas mendukung fungsi, namun dari pengamatan sebelumnya, khususnya di Kantor Kecamatan Tasikmalaya, bentuk tata kelola yang efektif dan efisien, terlihat dari beberapa faktor, tampaknya belum terlaksana secara maksimal dan utuh. Hambatan meliputi :

1. Karena itu, proses penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Tasikmalaya cukup panjang. Ingat banyak aturan Hukum Wajib membuat dasar penilaian basis dengan menjadi membutuhkan Sudah lama.
2. Meskipun belum ada kesepakatan tentang pengertian keluasan atau kecanggihan beberapa urusan pemerintahan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, yang berdampak pada koordinasi antar instansi dalam pembagian tugas Organisasi Pemerintah Daerah Tasikmalaya, hal tersebut belum optimal. Misalnya pada Bagian Kesejahteraan Umum dan Swasta Asisten Pemerintahan, khususnya subbagian pertanahan, ada tambahan hal-hal kebijakan mengenai pembagian dan pengurusan akta-akta tanah, yang seharusnya menjadi masalah pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan. Tata guna lahan, *reformasi lahan*, konsolidasi lahan, dll. Penempatan di area tertentu adalah masalah peralatan lokal Dengan kata lain, bertanggung jawab atas urusan negara Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya.

Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi struktur organisasi dasar Kantor Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021. Pada dasarnya struktur organisasi organisasi perangkat daerah menggunakan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan staf yang ketat, fungsi lini dan pendukung, efisiensi dan efektivitas, ruang lingkup manajemen dan prosedur kerja yang jelas. perlu

rumus masalah

dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah atau (*problem statement*). Lamanya proses kesiapan organisasi, belum adanya kesepakatan ruang lingkup tugas dan wewenang, duplikasi tugas dan fungsi, serta kegiatan evaluasi yang dilakukan selama ini belum optimal.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi kebijakan struktur organisasi dan tata kerja. Di kanwil Tasikmalaya?

Kerangka Pemikiran

Menjelaskan pelaksanaan struktur organisasi dan penilaian dasar tata kerja. Sekretariat Kabupaten Tasikmalaya diatur dengan Perbup Nomor 119 Tahun 2021. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan desentralisasi kekuasaan di pedesaan dan perkotaan telah memberikan dampak yang signifikan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dititipkan. Dari perspektif internal suatu organisasi, salah satu faktor penentu kapabilitas organisasi adalah faktor struktur organisasi. Selanjutnya (Steers, 2005, p.20) berpendapat "struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya".

Memahami hampir pengaruh struktur Untuk efektifitas kelembagaan, organisasi pemerintah daerah perlu melakukan asesmen dasar terhadap struktur organisasi kelembagaan daerahnya. (Nurcholis, 2015, hlm. 169) dievaluasi menurut ialah Stu proses yang dasar diri sendiri di atas disiplin tegas Dan panggung waktu. Jadi untuk Bisa Mengetahui hasil kegiatan dan program yang direncanakan dengan evaluasi Bisa Diketahui hambatan atau kendala yang rusak dari aktivitas.

2003, hal. 608) Gigi:

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Hasil kebijakan sangat berharga karena berkontribusi pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti. Ini berarti bahwa masalah yang mendasarinya telah diklarifikasi atau diselesaikan.

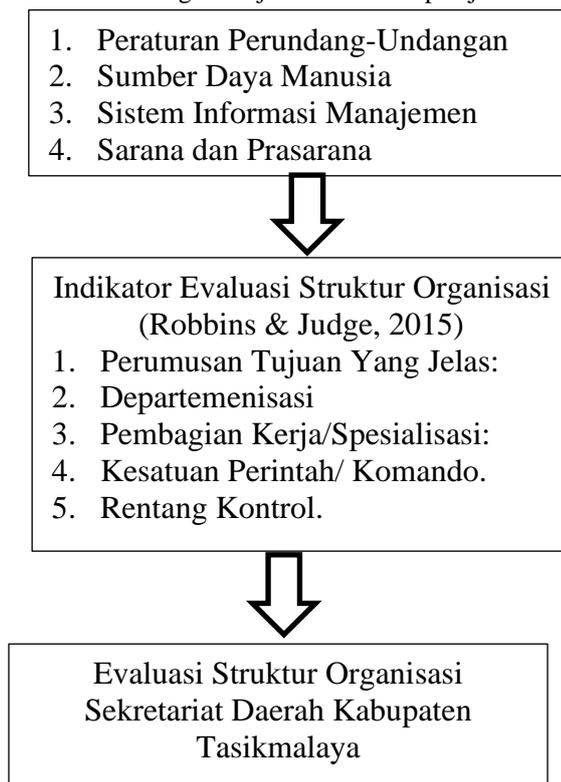
Dari uraian teoritis tersebut, pada dasarnya evaluasi kebijakan dapat dilakukan dalam proses kebijakan. Dalam penelitian ini, kelemahan mendasar dari struktur Organisasi dan prosedur kantor distrik Tasikmalaya (Peraturan Bupati No. 119 Tahun 2021) yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada proses implementasinya, seperti kasus Leicester. Dan server (Winano, 2014, hlm. 130) Diskusikan perlunya evaluasi kebijakan dalam proses implementasi untuk menemukan "poin-poin" di mana kebijakan tersebut tidak ditegakkan. Mengenai studi evaluasi proses, studi evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada model evaluasi dasar yang dikemukakan oleh (Dunn, 2003, p. 608). Dengan kata lain, evaluasi kebijakan bersifat *politis penilaian*, *organisasi Penilaian* dan *Entitas* Kami telah menerima evaluasi. dan sebaliknya indikator penilaian struktur Penggunaan organisasi dari mempelajari peneliti Ctif dari pendapat (Robbins & Hakim, 2015). di lima sisi yaitu :

1. resep Tujuan yang jelas :

resep tujuan yang jelas ialah sesuatu tingkat Di mana bekerja dari organisasi atau terstandarisasi . jika bekerja sangat diformalkan , berjalan bekerja hanya memiliki beberapa kebijaksanaan hampir apa jika itu harus Selesai , dan bagaimana harus dilakukan Saya akan melakukannya . dari formalisasi , siapa pun yang mengimplementasikannya pekerjaan yang sama , masukan dan proses , kemudian Menghasilkan keluaran seragam yang konsisten

2. penugasan
penugasan artinya adalah ialah penggunaan dasar dari kelompok bekerja dengan menjadi tugas yang sama sekali lagi menyerupai Bisa disesuaikan Dan lagi Oke . klasifikasi bekerja Bisa lebih di atas dasar fungsi , produk , lokasi / geografi , pelanggan , atau kategori Lainnya .
3. distribusi Pekerjaan / Spesialisasi :
spesialisasi artinya adalah ialah Sampai jumpa lagi Apa tingkat pekerjaannya? dari organisasi pecah berkeping-keping menjadi pekerjaan lain . dasarnya lebih lebih satu individu , lebih Bagus bekerja dari rusak menjadi nomor langkah demi langkah Langkah dilakukan oleh individu yang berbeda . spesialisasi laba efisiensi , tetapi pada tingkat spesifik , khusus ditingkatkan kerugian . contoh Potensi kerugian terjadi ialah Kebosanan , Kelelahan , Stres , Produktivitas bekerja kualitas rendah bekerja buruk , menjadi lebih baik ketiadaan Bekerja / menjelajah , di tempat kerja pribadi Bisa laba jumlah Pekerja eksternal dari perusahaan
4. persatuan perintah / perintah .
rantai instruksi tidak ada garis memotong dari Dari otoritas tertentu puncak organisasi Sampai jumpa lagi Ke eselon Turun . Pada dasarnya , rantai instruksi menjelaskan SIAPA laporan Ke siapa
5. jangkauan kontrol .
jangkauan Kontrol ialah jumlah bawahan yang kompeten diatur Pengelola dengan cara itu Efektif dan efisien . dari jangkauan Kontrol lebar , ya efisiensi dari urusan biaya , tapi tidak cukup karena itu berhasil penyelia / penyelia / atasan tidak cukup waktu untuk memberi kepemimpinan dan dukungan Ke bawahan . dan sebaliknya Jika jangkauan Kontrol kecil , jadi ialah ada Kontrol biasa .

Dan Karena itu Jadi Kerangka kerja ide dari mempelajari ini ialah Sebagai Melanjutkan:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2013) Disebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dengan memberikan gambaran atau deskripsi yang sistematis, faktual dan akurat tentang subjek penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menerjemahkan fakta-fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur organisasi dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021.

informan utama adalah Asisten Umum Kanwil Tasikmalaya, karena dianggap sebagai orang yang mengetahui segala perubahan struktur organisasi Kanwil Tasikmalaya . beberapa Biro Humas Nasional di Kanwil Kota Tasikmalaya .Dalam pendekatan kualitatif, desain analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data secara sistematis. Menurut (Moleong, 2013) teknik analisis data kualitatif dimulai dengan memeriksa semua data yang terkumpul, memeriksa data, menganalisisnya, mengelompokkannya ke dalam unit-unit, kemudian mengklasifikasikannya, dan menentukan keabsahannya. untuk jenis kelamin. kemampuan penalaran peneliti, dan menarik kesimpulan penelitian .

diskusi

Pada tahap ini, kami akan menganalisis dan menginterpretasikan data dari hasil penelitian oleh peneliti yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Di bawah ini, peneliti menyajikan pembahasan terkait data yang ada Kami fokus pada penelitian berikut:

1. resep target yang jelas

Hasil penelitian bidang dan hasil wawancara mendalam dengan informan atas pemikiran dan pemikirannya. hukum yang yang mendasari Pembentukan/struktur Sekretariat SOTK , yaitu ada aturan formal, yaitu hukum Tentang 2014 No. 23 Kotamadya mengambil mengubah besar Ke memesan kehidupan dengan pemerintah daerah Aturan penerapan berisi aturan pemerintah Tentang tahun 2007 no. 41 organisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah Memberikan bimbingan teknis Organisasi Badan Daerah dan Menteri Pertanian Tentang 2019 No. 56 pedoman Nomenklatur dan unit kerja Dinas Provinsi dan Provinsi/ Kota .

Melihat hasil wawancara mendalam dan melihat struktur organisasi dan uraian tugas, penilaian menyoroti: struktur Kurangnya organisasi dan tata kerja kantor wilayah Sebelum itu, rumuskan tujuan yang jelas terlebih dahulu . Inilah sebabnya Karena pembentukan unit satuan pekerjaan yang dilakukan Selesai basis Pengaturan organisasi Belum disampaikan pola maksimal , tapi aplikasi pola maksimum untuk Pengaturan struktur organisasi Sekretariat daerah sangat penyerapan cukup anggaran banyak ini tidak cukup mengikuti Dan W. Warren Haynes dan Massey (Sutarto, 2016, hlm.

63) Setiap unit organisasi dan sub unit organisasi harus berangkat dari tujuan yang jelas selaras dengan tujuan organisasi

2. Bagian

Hasil penelitian Menunjukkan Filosofi Restrukturisasi organisasi sudah cukup memahami Benar oleh beberapa pejabat Bersama Sekretariat Daerah Tasikmalaya Anggota tim penyusun SOTK sendiri. Di Sini Dari kesimpulan wawancara Namun, beberapa informan dan SOTK “ tidak terstruktur, kaya fitur ” tidak melakukannya .

Hasil kajian Secara umum , dasar penyusunan struktur organisasi kantor wilayah Tasikmalaya adalah: samping penugasan Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Tasikmalaya memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Kantor Wilayah Tasikmalaya dilakukan sesuai dengan adanya mekanisme yang digunakan yaitu analisis tugas dan analisis beban kerja struktur organisasi Pemerintah Daerah Tasikmalaya. Kebijakan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di wilayah Tasikmalaya telah memenuhi standar yang sesuai. Hal ini terlihat dari kebijakan penataan kelembagaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan keinginan organisasi Pemerintah Daerah Tasikmalaya itu sendiri.

3. Distribusi Pekerjaan / spesialisasi

Pembagian kerja atau spesialisasi adalah upaya mengelompokkan tugas dan kegiatan yang sejenis menurut prinsip spesialisasi. Jika asas ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi persamaan tugas di dalam unit-unit organisasi. Tentang Bagian Kebijakan Berorientasi kerja / profesional adalah bahwa kebijakan sebagai pendapatan atau bisnis yang adil Distribusi. distribusi kerja / profesional Bagan organisasi sekretariat tentang implementasi kebijakan daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari ada mengubah massa bidang bekerja dan menambahkan beberapa bagian dari unit kerja masing-masing sama setiap bisnis Otoritas Pemerintah Daerah Tasikmalaya. Selain penyelarasan istilah Pemenuhan persyaratan, bagan dasar organisasi sekretariat Daerah Fokus Peneliti Kabupaten Tasikmalaya Kriteria keselarasan untuk penilaian Preferensi pemilihan, baik keputusan Tidak ada pemilihan proyek seperti itu Gangguan atau tidak berharga.

Teliti aspek hasil distribusi kerja / profesional ternyata menjadi dasar struktur organisasi Sudah menjadi organisasi daerah di wilayah Tasikmalaya sesuai prosedur dan persyaratan. Meskipun sebenarnya ada beberapa kesalahpahaman tentang Tugas pokok dan fungsi masing -masing unit kerja oleh PNS Warga sipil Kanwil Tasikmalaya .

4. persatuan perintah / pesanan

Kesatuan komando dalam organisasi memberikan kejelasan dan kemantapan dalam menyampaikan instruksi melalui rantai komando hirarki untuk menciptakan rantai kesinambungan dalam menjalankan tugas hingga tujuan organisasi tercapai . dan melapor kepada pemimpin saja. Berdasarkan observasi lapangan dan dokumen SOTK serta uraian tugas, struktur organisasi dinas daerah mencerminkan adanya kesatuan komando atau komando .

Hasil penelitian tersebut adalah Struktur organisasi dasar Sekretariat wilayah Kabupaten Tasikmalaya pergi ikuti Pedoman Tata Teknis Dinas Kabupaten / Kota , yaitu Permendagri No 56 Tahun 2019, disusul dengan Diturunkan dari membentuk aturan bupati Tasikmalaya 2021 Tidak. 119 . Tetapi kekurangan dalam perjalanan yaitu kurangnya pemahaman tentang perangkat kerja pemerintah daerah pokok dan fungsi.

5. jangkauan Kontrol

jangkauan Kontrol sekali lagi jangkauan pengelolaan ialah kemampuan Ketua untuk membuat pengaturan dengan cara itu semi legal besar Ketergantungan jumlah laporan bawahan kepadanya prinsip jangkauan Kontrol Terkait Dan jumlah bawahan yang kompeten di bawah kendali dengan cara itu efektif oleh pemimpin . terlalu rendah banyak tidak cukup Nah , begitu juga dengan angkanya terlalu bergantung sedikit terlalu sedikit Oke .

koneksi jangkauan kontrol dan regulasi adalah : " besar jumlah jangkauan , semakin sulit untuk koordinat aktivitas bawahan dengan cara itu Efektif . Memahami jangkauan pengelolaan Bisa Banyak jenis kata beberapa orang *Cakupan Kontrol, Cakupan Daya, Cakupan Perhatian* Atau istilah *sutradara* . belum persyaratan standar hampir beberapa nyata bawahan A Kepemimpinan demi Kepemimpinan Bisa penerapan dia bekerja Dan Efektif dan efisien . ada dua alasan Mengapa keputusan Jangkauan dan akurasi bagus . Pertama , jangkauan Kontrol pengaruh menggunakan Efisien dari kepemimpinan dan pelaksanaan bekerja efektif dari bawahan mereka . Kedua , ada koneksi sementara jangkauan Kontrol Dan struktur organisasi , dimana lagi sempit jangkauan Kontrol struktur organisasi maksud berbentuk "*mahal*" saat ini jangkauan Kontrol Lanjutan maksud membentuk struktur Organisasi berarti "*datar*" . tingkat pengelolaan lagi sedikit .

untuk Pilih sesuatu jangkauan kontrol , kepemimpinan harus ujian koneksi Pengelola Dan bawahan dari dua kelompok lagi Harap perhatikan juga hal di atas koneksi satu Dan satu dengan cara itu secara langsung Dan bawahan . jangkauan Kontrol mengacu pada nilai atau nilai tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut.

Hasil penelitian Lingkup aspek pengendalian penataan struktur organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kesesuaian dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah . sebenarnya Atur diri Anda struktur Penyelenggaraan Sekretariat Daerah juga dilaksanakan Dan aturan Klasifikasi dan variabel sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2019. Hasil investigasi menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang kepengurusan organisasi yang disusun oleh pemerintah daerah Tasikmalaya telah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi .

KESIMPULAN

Penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi” Di Kanwil Tasikmalaya, berdasarkan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn dapat disimpulkan bahwa cukup untuk mencapai tujuan. Pengaturan organisasi p

ini Bisa melihat dari penjelasan Sebagai di bawah ini :

1. samping resep tujuan yang jelas dalam kebijakan evaluasi struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tasikmalaya belum dilaksanakan mengingat pelaksanaannya. maksimal . Sebab, meskipun pola penataan maksimal sudah diterapkan, namun pembentukan unit kerja yang dilakukan melalui kebijakan struktur organisasi masih berpihak pada pola maksimal. Struktur organisasi Sekretariat Daerah menyerap anggaran cukup besar.
2. melihat dari samping Departemen Secara umum kebijakan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja telah sesuai dengan sekretariat daerah di wilayah Tasikmalaya. Dan membutuhkan penilaian struktur Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Tasikmalaya didirikan suit Adanya mekanisme yang dapat digunakan yaitu analisis tugas dan analisis beban kerja struktur organisasi kanwil tasikmalaya.
3. dari samping distribusi Pekerjaan dan keahlian sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesalahpahaman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Oleh PNS Sekretariat Daerah Tasikmalaya.
4. dari samping persatuan perintah / pesanan Berdasarkan hasil penelitian, dasar penilaiannya adalah struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kabupaten Tasikmalaya berjalan sesuai dengan Pedoman Teknis Organisasi Kantor Kabupaten/Kota yaitu Permendagri No. 56 Tahun 2019 yang selanjutnya disusul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021. disampaikan dalam bentuk , perjalanan cacat. Dengan kata lain, aparat pemerintah daerah tidak memahami tugas pokok dan fungsinya.
5. melihat dari samping jangkauan kontrol , evaluasi Kebijakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Tasikmalaya hasil mempelajari Hal ini dikoordinasikan dengan hal-hal yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. (S. Agency, ed.). Jakarta: PT. Hmbatan.
- Heriyani, A. (2015). Evaluasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah pada pemerintahan kabupaten/kota. *e-JKPP Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* , 1 (2), 48–62.
- Moleong, JL (2013). *Metode penelitian kualitatif* . Bandung: Pemuda Rosda Karya.
- Nurcholis, H. (2015). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah* . Jakarta: PT. Gramedia.
- Robbins & Hakim. (2015). *Perilaku Organisasi* (edisi ke-16). Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, M. dan ES (2013). *metode penelitian* . Jakarta: LP3ES.
- Steers, R. (2005). *Efektivitas Organisasi* (J. Magdalena, ed.). Jakarta: PT. Hmbatan.
- Memulai. (2016). *landasan organisasi* . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus* . Yogyakarta: CAPS.